

BAB III

PENGARUH AMERIKA SERIKAT DI TIMUR TENGAH

Amerika Serikat telah sejak lama menanamkan kekuasaannya di Timur Tengah. Konflik menjadi unsur penting untuk melihat pengaruh dan campur tangan AS untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan di Timur Tengah. Maka dari itu, pada bab ini pengaruh militer AS akan dilihat melalui konflik geopolitik di kawasan yang melibatkan Mesir di dalamnya. Selain pengaruh militer, pengaruh ekonomi AS di Timur Tengah juga didukung oleh kekuasaannya di lembaga internasional, terutama Bank Dunia. Pengaruh AS di kawasan menjadi faktor penting mengapa Mesir mengundang AS dalam upaya menyelesaikan konflik Bendungan GERD.

3.1. Pengaruh Militer AS di Timur Tengah

3.1.1. Krisis Suez 1956

Konflik pertama yakni Krisis Suez pada tahun 1956. Kala itu, Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser, mengumumkan nasionalisasi *Suez Canal Company*, sebuah *joint British-French enterprise* yang sejak 1869 memegang kepemilikan dan mengoperasikan Suez Canal. *Suez Canal* menghubungkan Laut Mediterania ke Samudera Hindia sehingga terlahir jalan khusus yang digunakan untuk mengirimkan barang dari Eropa dan Asia secara langsung. Jalur ini juga digunakan sebagai rute penegiriman minyak bumi dari Timur Tengah ke Eropa. Pengumuman tersebut muncul setelah ketegangan politik meningkat antara Mesir, Inggris, dan Perancis.

Gambar 3.1 Lokasi *Suez Canal*



Sumber: BBC, 2006

Melalui nasionalisasi, Mesir berharap dapat mengenakan biaya tol kepada tiap kapal yang melewati kanal untuk membiayai pembangunan *High Aswan Dam* di Mesir (History, 2009). Pemerintah Eisenhower (AS) khawatir dengan kemungkinan pecahnya permusuhan antara sekutu NATO (Perancis dan Inggris) dengan negara Timur Tengah berpengaruh. Selain itu, terdapat kemungkinan intervensi Uni Soviet dalam konflik yang berusaha menanamkan ideologi dan pengaruhnya di Timur Tengah. Guna mencegah kemungkinan tersebut, AS berusaha menengahi perselisihan tersebut melalui upaya diplomasi. Namun dalam diskusi dengan AS sekitar bulan Agustus-Oktober, Pemerintah Inggris berulang kali mengisyaratkan bahwa mereka mungkin akan menggunakan kekerasan dalam meneghadapi Nasser. Pada saat yang

sama, Inggris dan Perancis mengadakan pertemuan militer rahasia dengan Israel, yang menganggap Nasser sebagai ancaman terhadap keamanan Israel. Sehingga tercipta rencana bersama untuk menyerang Mesir dan menggulingkan Presidennya (Office of the Historian, 2023).

Pasukan Israel kemudian menyerang Semenanjung Sinai di Mesir pada 29 Oktober 1956. Dua hari kemudian Inggris dan Prancis mendaratkan pasukan mereka beberapa hari kemudian. Soviet kemudian mendukung Mesir guna mendapatkan pijakan di Timur Tengah. Soviet kemudian memasok senjata ke pemerintah Mesir dan membantu Mesir membangun *High Aswan Dam*. Pemimpin Soviet kala itu, Nikita Khrushchev menentang invasi tersebut dan mengancam menghujani rudal nuklir di Eropa Barat jika Israel, Prancis, dan Inggris tidak mundur. Eisenhower menanggapi hal tersebut dengan memperingatkan Khrushchev untuk menahan diri dari intervensi langsung karena konflik nuklir hanya akan memperburuk keadaan. Di sisi lain, Eisenhower dan Menteri Luar Negeri AS, John Foster Dulles, juga mengeluarkan peringatan keras kepada Prancis, Inggris, dan Israel untuk menghentikan serangan dan segera menarik diri dari Mesir. AS mengancam ketiga negara tersebut dengan sanksi ekonomi jika mereka terus melakukan serangan. Ancaman tersebut membuahkan hasil, pada 6 November, Inggris dan Prancis menerima gencatan senjata PBB. Selain itu, AS menyetujui resolusi PBB yang secara terbuka mengutuk invasi tersebut dan menyetujui pembentukan pasukan perdamaian PBB. Krisis Suez menandai penggunaan pasukan perdamaian PBB untuk mengawasi

berakhirnya permusuhan dan penarikan ketiga pasukan dari medan perang. Pada bulan Desember, Inggris dan Prancis mundur dari Mesir. Israel tunduk pada tekanan AS dan menyerahkan kendali atas *Suez Canal* kepada Mesir (History, 2009).

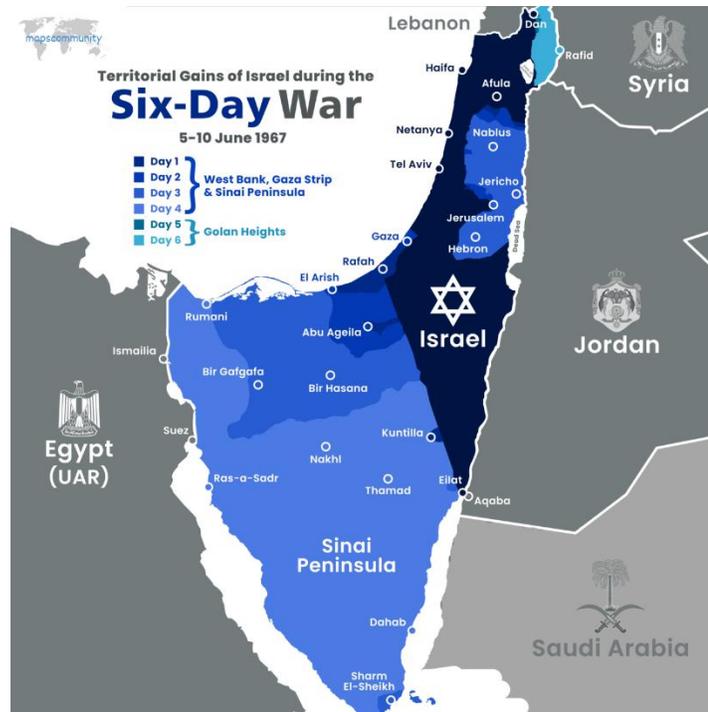
Krisis Suez mendorong terciptanya Doktrin Eisenhower. Pada tanggal 5 Januari 1957 di sidang gabungan dengan Kongres, Eisenhower mengusulkan pemberian \$200 juta untuk bantuan ekonomi dan militer kepada negara-negara Timur Tengah yang meminta bantuan melawan “*overt armed aggression from any nation controlled by international communism*”. Usulan tersebut kemudian disetujui Kongres guna membendung pengaruh komunisme di Timur Tengah seperti apa yang dilakukan Soviet dengan mendukung Mesir dalam Konflik Suez (Danin, 2012). Keputusan Pemerintah Eisenhower untuk mengeluarkan doktrin tersebut Sebagian besar dipengaruhi meningkatnya sentimen negara-negara Arab terhadap Barat dan meningkatnya pengaruh Soviet di Mesir dan Suriah. Konflik Suez telah mengakibatkan kekosongan kekuasaan di Timur Tengah akibat hilangnya popularitas Inggris dan Prancis. Eisenhower khawatir Nasser akan menyebarkan nilai pan-Arabnya¹ dan membentuk aliansi dengan Yordania dan Suriah. Selain itu, kekosongan ini juga akan membuka jalan bagi Soviet untuk menanamkan ideologinya di Timur Tengah. Eisenhower ingin kekosongan tersebut diisi oleh AS karena jika nasionalisme radikal bergabung dengan komunisme internasional maka hal ini akan mengancam kepentingan Barat di Timur Tengah (Office of the Historian, 2023).

¹ Paham atau gerakan penyatuan negara-negara Arab dengan menjunjung nilai nasionalisme.

3.1.2. Six Day War 1967

Six Day War yang berlangsung pada 1967 antara Israel melawan koalisi negara Arab yang terdiri dari Mesir, Suriah, Yordania, Irak, Arab Saudi, dan Lebanon. Perang ini dilakukan sebagai upaya *pre-emptive strikes* atas keputusan Nasser. Dimana pada 14 Mei 1967, Nasser mulai memobilisasi pasukan militer Mesir ke Sinai. Dua hari kemudian ia secara resmi meminta penghapusan pasukan penjaga perdamaian PBB yang ditempatkan di Sinai. Permintaan tersebut disetujui Sekjen PBB kala itu, U Thant. Kemudian pada tanggal 22 Mei, Nasser memblokir Gulf of Aqaba untuk pelayaran Israel. Pada 30 Mei, King Hussein of Jordan tiba di Kairo untuk menandatangani pakta pertahanan bersama Mesir dengan menempatkan pasukan militer Yordania di bawah komando Mesir. Tak lama kemudian, Irak turut bergabung dengan aliansi tersebut. Menanggapi pergerakan Mesir, pemerintah Yordania, Irak, Arab Saudi, Suriah, dan Lebanon memindahkan pasukannya menuju perbatasan Israel. Pada tanggal 29 Mei, Yordania memiliki 56.000 tentara dan 270 tank. Suriah mengerahkan 50.000 tentara di Dataran Tinggi Golan. Pasukan Mesir yang siap melawan Israel dipekirakan berjumlah 130.000 tentara dan 900 tank (“Timeline | the Six-Day War,” 2023). Ancaman ke Israel diperkuat dengan pernyataan para pemimpin Arab termasuk Presiden Irak, Abdur Rahman yang menyatakan “*Our goal is clear – to wipe Israel off the map*” (“Arab Threats against Israel | the Six-Day War,” 2023).

Gambar 3.2 Peta Six Day War



Sumber: Maps on the Web, 2021

Pada 5 Juni 1967, Israel memulai serangan udara yang dimaksudkan sebagai *pre-emptive strike*. Serangan tersebut menumbangkan 311 pesawat tempur Mesir. Yordania kemudian membalas serangan Israel dengan memborbardir kota Yerusalem. Serangan Yordania memotivasi Angkatan Udara Suriah dan Irak untuk menyerang Israel terutama daerah pemukiman penduduk bahkan termasuk rumah Perdana Menteri Israel. Israel kemudian menanggapi serangan Yordania dengan menyerang lapangan udara Yordania di Mafraq dan Amman. Israel juga menyerang pangkalan udara Suriah dan menghancurkan 2/3 pesawat Suriah.

Hari kedua perang diawali dengan serangan artileri Suriah di Galilea, Israel. Lebih dari 250 senjata menembakkan sekitar 45ton amunisi per menit ke kota

tersebut. Di sore hari, Lebanon menyerang Israel dengan pesawat di Galilea. Israel dan Yordania menerima gencatan senjata PBB, namun Mesir dan Suriah tidak menyepakati hal tersebut. Raja Hussein kemudian memerintahkan pasukannya mundur dari medan perang. Pada hari ketiga, pasukan Israel berhasil menguasai Yerusalem Timur, termasuk Kota Tua dan situs paling suci di Yerusalem, Bait Suci. Sementara itu, Suriah terus melakukan serangan udara. Pada hari keempat, Israel menguasai West Bank sementara Suriah terus melakukan penembakan terhadap penduduk Israel di bagian utara. Gempuran antara Pasukan Israel dan Suriah mencapai puncak pada hari kelima. Sebelumnya Israel yang berusaha menghindari kontak secara langsung di darat dengan pasukan Suriah akhirnya berbalik arah untuk melindungi warga Israel di utara. Sementara pasukan Arab lainnya mundur, Menteri Pertahanan Suriah, Hafez al-Assad memimpin pasukannya untuk tetap berada di posisi dengan menyatakan *“strike the enemy’s settlements, turn them into dust, pave the Arab roads with the skulls of Jews. Strike them without mercy”*. Pada hari keenam, Israel menguasai Dataran Tinggi Golan. Gencatan senjata kemudian disetujui semua pihak (Oren, 2002).

Setelah enam hari berperang, Israel muncul sebagai pemenang dan mengubah statusnya dari negara kecil menjadi negara adidaya regional. Negara-negara Timur Tengah mengakhiri perang dengan kehilangan ribuan prajurit. Israel telah menguasai Tanjung Sinai, West Bank, Gaza, Dataran Tinggi Golan. Perbatasan Israel diperluas hingga tiga setengah kali lipat dari ukuran aslinya sebelum perang. Pada 1 September

1967, para pemimpin negara Arab melakukan pertemuan di Sudan dan menyepakati '3 nos' yakni seruan yang berbunyi "*No peace with Israel; No negotiations with Israel, No recognition of Israel*". Kerangka perdamaian tercipta pada 22 November 1967 dimana PBB membentuk Resolusi 242 yang berisi *framework for future peace negotiations*. Resolusi ini menghendaki perdamaian abadi harus didasarkan pada tiga hal yaitu penarikan pasukan Israel dari wilayah, penghormatan dan pengakuan terhadap kedaulatan, dan pengaturan pengungsi Palestina (Ali & James, 2020: 8-9).

Kemenangan Israel dalam *Six Day War* berhasil menarik perhatian AS yang kali itu sibuk berperang di Vietnam dan tidak memiliki kesempatan untuk melibatkan militernya di Timur Tengah. Profesor sejarah Timur Tengah di Universitas Stanford, Joele Beinin, menyebut bahwa yang penting dari perang 1967 adalah ketika Israel mengalahkan negara-negara Arab dalam waktu enam hari tanpa bantuan militer AS sama sekali. Beinin menyatakan bahwa pendapat AS tentang Israel seperti: "*These guys are good, We are in a mess in Vietnam. Let's be connected to them*" (Narea, 2023). Hubungan bilateral antara AS dan Israel semakin berkembang setelah *Six Day War*.

3.1.3. Yom Kippur 1973

Permusuhan antara Israel dan negara-negara Arab masih terus berlanjut. Dimana pada 6 Oktober 1973, pasukan Mesir dan Suriah Kembali menyerang Israel pada peringatan Yom Kippur (hari paling suci di kalender Yahudi). Serangan ini ditujukan untuk merebut Kembali wilayah yang diambil Israel pada *Six Day War*

1967. Imbas perang, Mesir kehilangan Semenanjung Sinai dan Jalur Gaza, Yordania kehilangan West Bank dan Yerusalem Timur, Suriah kehilangan Dataran Tinggi Golan. Keputusan tersebut dating dari buah pemikiran Presiden Mesir, Anwar el-Sadat yang mulai menjabat pada tahun 1970. Mesir dan Suriah secara bersamaan melanggar kesepakatan gencatan senjata dan mulai menyerang Israel. Di selatan, Sadat mengirimkan 100.000 tentara dan 1.350 tank untuk melintasi *Suez Canal*. Di utara, Suriah menyerang Dataran Tinggi Golan termasuk rumah penduduk sipil. Suriah kemudian berhasil merebut pos pengamatan Israel Defence Forces (IDF). Pasukan Israel kalah jumlah di kedua sisi dan tidak siap dengan serangan tersebut. Namun, setelah tiga hari pertempuran, serangan Mesir menemui jalan buntu. Sementara, di Golan, Israel mampu memukul mundur pasukan Suriah dan merebut kembali IDF (McKernan, 2023).

Perang kali ini didukung oleh dua kekuatan dunia yang kala itu sedang berada dalam medan perang dingin, AS dan Soviet. Soviet mulai memasok senjata ke Mesir dan Suriah. Israel juga meminta hal yang sama kepada AS, Presiden Nixon yang tidak ingin Israel kalah akhirnya menyetujui pengiriman senjata pada 14 Oktober. Pada 19 Oktober, Nixon mengirimkan \$2,2 miliar bantuan militer ke Israel. Negara-negara Arab menanggapi keputusan tersebut dengan mengembargo pengiriman minyak ke negara-negara yang mendukung Israel. Embargo berdampak pada penurunan 14% pasokan minyak internasional. AS kala itu sangat bergantung terhadap konsumsi minyak dimana sebagian besarnya diperoleh dari Timur Tengah

(Council on Foreign Relations, 2017). Krisis minyak telah mengguncang perekonomian dunia dan menyebabkan harga minyak naik empat kali lipat. Sebelum embargo, harga minyak berkisar \$2,90 per barel menjadi sekitar \$11,65 per barel pada bulan Januari 1974 (AlJazeera, 2023).

Gambar 3.3 Kronologi Perang Yom Kippur 1973

MIDDLE EAST
The October Arab-Israeli War of 1973

On October 6, 1973, Egypt and Syria jointly launched a surprise attack against Israel on the Jewish holiday of Yom Kippur in order to regain the territory they lost in 1967.



October 6, 1973
Egyptian and Syrian armies launch a two-front offensive attacking Israeli military positions in the Sinai Peninsula and the Golan Heights.

October 14, 1973
The United States launches a massive airlift of military supplies to Israel to help bolster its defences

October 17, 1973
OPEC, led by Arab countries, imposes an oil embargo on the US and other nations for supplying weapons to Israel, prompting an energy crisis. The embargo lasted until March 1974.

October 22, 1973
The United Nations passes Resolution 338, calling for an immediate ceasefire and negotiations to end the conflict, which does not hold.

October 25, 1973
A second ceasefire is secured, officially ending the war.

March 26, 1979
Egypt signs a peace treaty with Israel following the 1978 Camp David Accords. According to the agreement, Israel would relinquish the Sinai Peninsula to Egypt in exchange for Egypt's full recognition of Israel.

■ Territories that Israel occupied in 1967

Source: Al Jazeera

@AJLabs ALJAZEERA

Sumber: AlJazeera, 2023

Krisis mereda ketika Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 340 yang menyerukan gencatan senjata, penarikan semua pasukan ke posisi awal pada tanggal 22 Oktober, serta menempatkan pasukan penjaga perdamaian guna memantau

gencatan senjata. Mesir dan Israel menyetujui hal tersebut. Namun hal ini tidak membuat negara Arab mencabut embargo minyak mereka. Maka dari itu, Presiden Nixon dan Menteri Luar Negeri AS kala itu, Henry Kissinger, mulai melakukan “*shuttle diplomacy*” dengan produsen minyak utama di kawasan untuk mengakhiri embargo dan dengan Mesir, Suriah, serta Israel guna mengatur penarikan Israel dari Semenanjung Sinai dan Dataran Tinggi Golan. Perbincangan mencapai puncak pada 18 Januari 1974 dengan ditandatanganinya *the First Egyptian-Israeli Disengagement Agreement* (Office of the Historian, 2021). Pada 18 Maret 1974, negara-negara Arab setuju untuk mencabut embargo dengan syarat bahwa AS ikut mendorong pelepasan Israel-Suriah (Council on Foreign Relations, 2020).

Perjanjian perdamaian yang ditunggu banyak pihak akhirnya terwujud pada September 1978 dengan dibentuknya *Camp David Accord* yang merupakan sebuah kerangka kerja yang mendasari perjanjian perdamaian antara Mesir dan Israel. AS yang dipimpin Presiden Jimmy Carter berperan penting sebagai negosiator dalam mengupayakan penyelesaian konflik antara Mesir dan Israel tersebut. *Camp David Accord* kemudian melahirkan perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada 26 Maret 1979 oleh Presiden Mesir Anwar Sadat, dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin (Office of the Historian, 2020). Israel kemudian setuju untuk menarik diri dari Semenanjung Sinai dan Mesir berjanji untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel serta membuka *Suez Canal* untuk kapal Israel (Terrill, 2009).

Gambar 3.4 Penandatanganan *Camp David Accord*



Sumber: The Carter Center, 1978

Keputusan Mesir untuk menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel telah memisahkan Mesir dari seluruh negara Arab. Hubungan Mesir dan AS juga semakin erat setelah perjanjian tersebut dan berperan sebagai pemeran utama di antara negara-negara Arab. Hubungan bilateral tersebut semakin erat dengan pemberian bantuan AS ke Israel dan Mesir. Sejak akhir 1970an sampai 1997, bantuan tahunan AS ke Israel dan Mesir berjumlah antara 33%-43% dari seluruh anggaran bantuan luar negeri AS. Pada tahun 1997, total bantuan AS ke Mesir mencapai \$49 miliar dimana 75% di antaranya adalah bantuan keamanan. Sedangkan total bantuan AS ke Israel lebih dari \$71 miliar, skitar 90% di antaranya merupakan bantuan keamanan. Bantuan tersebut digulirkan dengan tujuan utama untuk mengamankan “*a just and lasting comprehensive peace*” antara Israel dan tetangganya, terutama Mesir (Clarke, 1997). Sampai saat ini, Israel dan Mesir masih menduduki peringkat atas

sebagai negara penerima bantuan militer AS seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.5 di bawah.

Gambar 3.5 Sepuluh Negara Penerima Bantuan Militer AS Terbesar Tahun 2021

	Country	▼ Military Aid
1	Israel	\$3.3B
2	Egypt	\$1.1B
3	Jordan	\$428.45M
4	Somalia	\$312M
5	Iraq	\$250.28M
6	Philippines	\$178.24M
7	Ukraine	\$121.97M
8	Tunisia	\$92.02M
9	Lebanon	\$86M
10	Bulgaria	\$41.41M

Sumber: Foreign Assistance, 2021

3.2. Pengaruh Ekonomi AS terhadap Bank Dunia di Kawasan Timur Tengah

Pengaruh AS di kawasan Timur Tengah tidak hanya tertuju pada suatu negara dalam mengupayakan konflik secara langsung, namun juga tertuju pada organisasi internasional yakni Bank Dunia. Organisasi tersebut tidak sepenuhnya independen, terutama dari negara-negara kuat yang mendukung mereka. Menurut Andersen (2006), negara-negara berkembang menerima bantuan dalam jumlah yang lebih besar ketika mereka bersekutu dengan AS. Negara yang dianggap penting secara politik mampu membangun banyak proyek dengan didukung oleh pencairan dana yang lebih besar, lebih cepat, dan lebih dapat diandalkan.

Secara formal, AS memegang suara terbesar dalam *voting share*, jadi AS

Member	Subscription Amount	Percentage of Total Subscriptions	Number of Votes	Percentage of Total Voting Power
UNITED STATES	43,847.5	16.44	439,304	15.56
JAPAN	19,988.5	7.5	200,714	7.11
CHINA	16,685.9	6.26	167,688	5.94
GERMANY	11,857.8	4.45	119,407	4.23
UNITED KINGDOM	10,861.1	4.07	109,440	3.88

memiliki kemampuan yang cukup besar untuk melanggengkan kepentingannya di Bank Dunia. Sampai saat ini, AS tercatat sebagai negara dengan *voting share* terbesar di Bank Dunia, seperti ditunjukkan pada gambar 3.6 di bawah.

Voting share yang dimiliki tiap negara anggota didasarkan pada jumlah saham yang dimilikinya (The World Bank, 2022). AS memiliki saham terbesar di antara 189 negara anggota dengan 17,25%, dilanjutkan dengan Jepang (7,42%), China (4,78%),

Sumber: The World Bank, 2023

Jerman (4,33%), Perancis dan Inggris (masing-masing 4,06%) (The World Bank Investor, n.d.). Kekuatan AS dilanggengkan oleh Presiden Bank Dunia yang selalu berkebangsaan Amerika Serikat yang diusulkan oleh pemerintah AS. The Board of Governors² cukup meratifikasi calon yang diajukan AS. Meskipun undang-undang mengizinkan, hingga saat ini belum ada *governor* yang berani atau setidaknya secara terbuka mengusulkan calon dari negara lain atau calon dari AS selain yang dipilih oleh pemerintah. Jabatan sebagai Presiden Bank Dunia selama berdirinya Bank Dunia di tahun 1946 sampai saat ini terbukti masih diduduki oleh warga negara AS yang Sebagian besar berasal dari sektor bisnis swasta di negara tersebut (Toussaint, 2020). Hal ini ditunjukkan pada tabel 3.1 di bawah.

Tabel 3.1 Presiden Bank Dunia sejak 1946

PRESIDEN BANK DUNIA SEJAK 1946

² The Board of Governor diwakili oleh satu governor yang ditunjuk negara anggota dan berperan sebagai pengambil keputusan sesuai Articles of Agreement.

Nama	Masa Jabatan	Kebangsaan	Jabatan Terdahulu
Eugene Meyer	Juni 1946 – Desember 1946	AS	Merchant banker on Wall Street
John J. McCloy	Maret 1947 – Juni 1949	AS	Director of the Chase National Bank
Eugene Black	Juli 1949 – Desember 1962	AS	Vice President of Chase Manhattan Bank
George Woods	Januari 1963 – Maret 1968	AS	President of First Boston Corporation
Robert McNamara	April 1968 – Juni 1981	AS	CEO of Ford, then US Secretary of Defense
Alden Clausen	Juli 1981 – Juni 1986	AS	President of Bank of America
Barber Conable	Juli 1986 – Agustus 1991	AS	Member of Congress and the Congress Banking Commission
Lewis Preston	September 1991 – Mei 1995	AS	President of JP Morgan & Co.
James Wolfenshon	Juni 1995 – Mei 2005	AS	President of James Wolfensohn Inc.
Paul Wolfowitz	Juni 2005 – Juni 2007	AS	US Deputy Secretary for Defense
Robert Zoellick	Juli 2007 – Juni 2012	AS	Bank executive with Goldman Sachs
Jim Yong Kim	Juli 2012 – Februari	AS	Physician and Anthropologist

	2019		
David Malpass	Februari 2019 – Juni 2023	AS	Chief Economist of Bear Stearns Investment Bank
Ajay Banga	Juni 2023 – sekarang	AS	Executive Chairman of Mastercard

Sumber: Toussaint, 2020

Sejak awal berdirinya Bank Dunia hingga saat ini, AS adalah satu-satunya negara anggota yang secara de facto memiliki hak veto di Bank Dunia. Pada tahun 1946, AS memiliki 35,07% hak suara. Dalam agenda perubahan undang-undang, Bank Dunia membutuhkan mayoritas 80% suara (dimiliki setidaknya 60% negara anggota), dengan 35,07% hak suara, AS muncul sebagai pemberi suara utama terhadap perubahan di tubuh Bank Dunia. Situasi berubah pada tahun 1987 dimana AS tidak dapat mempertahankan suara mayoritas karena bertambahnya negara anggota Bank Dunia. Namun, sekutunya saat itu, Jepang, menegosiasikan peningkatan signifikan dalam hak suaranya dengan perwakilan AS. AS kemudian menyetujui hal tersebut dan menerima pengurangan hak suaranya dengan syarat ambang batas perubahan undang-undang dinaikkan menjadi 85%. Keputusan tersebut menempatkan Jepang sebagai negara terpenting kedua dan AS tetap mempertahankan hak vetonya (Toussaint, 2020).

Sejumlah faktor di atas menguatkan pengaruh AS di lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia. Pengaruh tersebut juga terimplementasi ke kebijakan Bank Dunia terhadap kebijakan ekonomi negara di suatu kawasan.

Kawasan MENA (*Middle east and North Africa*) merupakan suatu kawasan special dimana terdapat ketidakstabilan politik dan ekonomi, maka dari itu Bank Dunia bekerja sama dengan negara-negara di kawasan tersebut untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong kesejahteraan. Kebijakan yang dirancang Bank Dunia untuk mewujudkan cita-cita tersebut tidak lepas dari pengaruh AS sebagai donor utama Bank Dunia.

Pertama, pengaruh tersebut muncul di negara Mesir yang merupakan negara Arab pertama yang sepakat menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel di tahun 1979, sehingga secara resmi mengakhiri perang antara kedua negara. Sejak saat itu, Mesir menjadi negara favorit sebagai penerima bantuan AS. Meskipun Mesir memiliki sedikit pinjaman di program *Bank and Fund*, namun Mesir terus menerima pinjaman tersebut meskipun tidak nampak perubahan signifikan setelah diterimanya pinjaman tersebut. Pengaruh politiklah yang melatarbelakangi kebijakan Bank Dunia untuk terus mengizinkan peminjaman tersebut. Tanpa Mesir, negara Arab lainnya tidak akan mendukung koalisi AS ketika mereka berperang dengan Irak. Tidak hanya itu, Mesir juga mengirimkan pasukannya untuk berperang bersama pasukan AS dalam membebaskan Kuwait. Tiga bulan setelah perang berakhir pada Mei 1991, Mesir mendapat *reward* berupa *Standby Loan* sebesar SDR 300 juta dan US\$300 juta *Bank Structural Adjustment Loan*. Mesir juga menerima penghapusan hutang lebih dari \$15 miliar dari negara-negara barat atas upaya dan dukungan Mesir kepada

sekutunya selama perang melawan Irak. Nominal tersebut tercatat sebagai tingkat pengampunan hutang tertinggi di kawasan MENA (Harrigan, Wang, El-Said, 2006).

Negara kedua yang mendapat keuntungan dari perubahan arah politis dengan AS adalah Yordania. Yordania merupakan sekutu Mesir sejak dahulu berperang melawan Israel. Setelah Perang Yom Kippur 1973 dan embargo minyak terhadap AS, AS mulai meningkatkan tekanan terhadap Raja Hussein untuk menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel. Namun menyepakati hal tersebut sama saja dengan bunuh diri, hal ini dikarenakan lebih dari setengah populasi Yordania berasal dari Palestina. Penolakan Raja Hussein berimbas pada keputusan AS untuk menanggukhan bantuan AS ke Yordania pada tahun 1978 (Shultz, 1993: 454-455). Selama periode ini, Yordania juga tidak mendapatkan perhatian dari Bank Dunia. Namun, pada tahun 1980an, muncul ketegangan antara Raja Hussein dan Presiden Palestina kala itu, Yasser Arafat tentang siapa yang harus mewakili Palestina dalam setiap upaya penyelesaian konflik dengan Israel. Akibatnya, Husein kembali melakukan perbincangan kerjasama dengan Israel (Dallas, 1999).

Pada tahun 1988, Yordania memutuskan semua hubungan ekonomi dan administratif dengan West Bank dan Jalur Gaza. Dengan dominasi Jordan's Palestinians, memutuskan hubungan dengan wilayah tersebut menciptakan ketidakpastian sehubungan dengan masa depan politik dan kehadiran mereka di Yordania. Mereka kemudian memindahkan modal secara besar-besaran dan membatasi investasi serta kegiatan ekonomi di Yordania. Hal tersebut menimbulkan

krisis keuangan pertama di Yordania. Dalam kurun waktu 6 bulan, Dinar Yordania kehilangan hampir 50% dari nilai nominalnya, hutang luar negeri Yordania membludak dan pendapatan per kapita menurun tajam (Kanovsky, 1989). Kerusakan kemudian terjadi dan menyebabkan Raja Hussein mengeluarkan perubahan besar dengan melakukan pemulihan parlemen pada tahun 1989. Dalam kurun waktu dua tahun, Raja Hussein menghapuskan darurat militer, melegalkan partai politik, dan memberikan kebebasan pers. Langkah tersebut membuat IMF memberikan hibah kepada Yordania senilai SDR 60 juta *Standby Agreement* dan Bank Dunia menyediakan dana sebesar \$160 juta untuk sector industry dan perdagangan. Keputusan Raja Hussein terhadap Israel, krisis ekonomi, dan politik liberal membuat telah berpengaruh terhadap dukungan IMF dan Bank Dunia atas Yordania (Harrigan, Wang, El-Said, 2006). Pada perang 1990-1991, Yordania menolak mendukung serangan AS terhadap Irak. Keputusan tersebut menyebabkan aliran bantuan Yordania dari AS dan seutu Arabnya terhenti. IMF dan Bank Dunia juga menangguhkan *standby funds*. Terjepit secara finansial, terisolasi secara internasional, dan tekanan AS mendorong “*alliance shift*” (Brand, 1994: 20). Raja Hussein mulai mengkritik Presiden Irak kala itu, Saddam Hussein dan berbicara tentang pergantian rezim di Irak. Yordania juga menjadi tuan rumah bagi pemimpin negara yang menentang Irak. Keputusan Yordania untuk mendukung AS dalam

3 Parlemen ditangguhkan sejak perang tahun 1976

konflik Irak membuat IMF menandatangani *Standby Fund* sebesar SDR 44,4 juta pada Februari 1992 (Harrigan, Wang, El-Said, 2006).

Pada tahun 1994, Yordania secara resmi menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel dan secara resmi mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 46 tahun anatar kedua negara tersebut. Sejak saat itu, Yordania tidak hanya menjadi salah satu negara penerima terbesar bantuan AS, tapi juga penerima enam pinjaman Bank Dunia dan tiga pinjaman IMF. Tiga bulan setelah Yordania menyetujui perjanjian perdamaian, Bank Dunia memberikan \$80 juta untuk sector pertanian. AS juga menghapuskan hutang Yordania sebesar \$833 juta dan membekali Yordania dengan alutsista canggih (Brand, 1994: 32). Keputusan dan posisi Yordania akan pergerakan AS di kawasan telah melanggengkan kebijakan yang diberikan lembaga keuangan internasional yakni Bank Dunia dan IMF kepada Yordania.

3.3. Kesimpulan

Pengaruh AS baik secara militer maupun ekonomi di kawasan Timur Tengah terbukti berimbas terhadap keputusan negara-negara di kawasan. Pengaruh militer AS dapat terlihat dari serangkaian konflik yang mewarnai dinamika politik Timur Tengah setelah Perang Dunia II. Konflik tersebut juga membentuk posisi AS saat ini, siapa yang ia dukung dan siapa yang ia lawan. Langkah tiap negara dalam menghadapi konflik telah berdampak pada penilaian AS terhadap negara tersebut, terutama pada bantuan luar negeri AS serta bantuan Bank Dunia. Selain itu, peran AS dalam

mengupayakan penyelesaian konflik di kawasan terbukti berhasil menciptakan kesepakatan berupa perjanjian perdamaian. Hal ini berpengaruh terhadap keputusan Mesir ketika mengundang AS sebagai negosiator dalam upaya penyelesaian konflik Bendungan GERD. Berkaca pada sejarah, AS berhasil menjadi mediator dalam konflik Mesir dengan Israel dan menghasilkan perjanjian perdamaian. Belum lagi, pengaruh AS di kawasan telah terbukti berpengaruh terhadap keputusan negara yang berkonflik. Ditambah dukungan Bank Dunia yang jika dilihat dari sejarah, setiap kali suatu negara sepakat dengan langkah AS, maka negara tersebut akan mendapatkan “hadiah” begitupun sebaliknya. Pengaruh AS inilah yang coba dimanfaatkan Mesir agar mendapatkan keputusan terbaik dalam upaya penyelesaian konflik Bendungan GERD.